

## **Hentikan Konversi Hutan ke Lahan Sawit**

by : Vien Dimiyati

PERKEBUNAN sawit diminta istirahat sejenak mengonversi hutan dan lahan gambut karena masih banyak lahan belum dimanfaatkan. Dari 20 juta hektare hutan yang dibuka buat lahan sawit baru gunakan sepertiganya.

Penasihat Politik Greenpeace Asia Tenggara Arif Wicaksono mengatakan, industri sawit yang berkembang dengan pesat mendorong kehancuran hutan dan menyumbang perubahan iklim yang membahayakan umat manusia.

Demi pengembangan perkebunan sawit, industri telah menghancurkan kawasan hutan. Tercatat 20 juta hektare hutan dibuka demi sawit. Namun, baru tertanam kurang dari sepertiga areal itu. "Setiap tahun 1,8 miliar ton emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim dilepas akibat degradasi serta kebakaran pada lahan gambut Indonesia. Jadi industri sawit harus istirahat sejenak mengonversi hutan dan lahan gambut," katanya pada diskusi Greenpeace bersama pelaku industri sawit, Selasa, (26/8).

Unilever, perusahaan pengguna sawit terbesar di dunia, telah menggeser posisi kebijakan dan menyatakan dukungan terhadap penerapan moratorium. Selain Unilever, Aceh dan Papua Barat juga mendukung penerapan ini.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menolak sistem moratorium atau penghentian sejenak ini. Ketua Harian Gapki, Derom Bangun mengatakan, Gapki akan memperbaiki perkebunan sawit di Indonesia. "Kekurangan dan kelemahan dari industri sawit ini akan kita perbaharui melalui *roundtable on sustainable palm oil* (RSPO). Ini akan menuntun perindustrian sawit di Indonesia secara berkelanjutan ke depan dan mengikuti aturan dan tuntutan yang dikeluarkan RSPO," ujar Derom.

Dengan mengikuti delapan prinsip dan 39 kriteria dari RSPO, Gapki yakin perkebunan sawit di Indonesia makin baik. "Jika kegiatan sawit ini dihentikan tiba-tiba akan banyak yang dikorbankan. Banyak sekali pegawai yang akan menjadi korban."

Menurut dia, harus ada peningkatan produksi sawit per tahun. "Satu kebun sawit produksi bisa empat ton minyak per hektare per tahun. Ini bisa dinaikkan lagi menjadi 4,5 ton dan terus naik menjadi lima ton. Tentu ini perlu cara tata pengelolaan yang baik."

Untuk itu, dalam dua tahun ini, Gapki telah mengaudit perusahaan besar untuk mendapatkan sertifikat RSPO. **Vien Dimiyati**